

OPTIMALISASI PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Hamdi Agustin, SE.MM, Ph.D
Dosen Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru
hamdiagustin@yahoo.com

Abstrak

Paper ini bertujuan untuk memberikan suatu pemikiran dalam rangka optimalisasi perbankan syariah menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan memberikan solusi dari permasalahan perbankan syariah di Indonesia untuk dapat menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Berdasarkan data keuangan menunjukkan perbankan syariah mempunyai potensi di Indonesia. Dengan demikian, Perbankan syariah Indonesia harus mampu memfasilitasi semua perbankan di ASEAN untuk dapat bekerjasama dan bersatu dalam menjalankan berbagai strategi pengembangan. Untuk itu, peran semua pihak dalam pengembangan perbankan syariah Indonesia diharapkan mampu menjadikan perbankan syariah Indonesia memiliki prospek yang baik, semakin berkualitas dan mampu bekerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam menghadapi ekonomi pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Perbankan syariah semestinya dapat menambah posisi tidak hanya sebagai lembaga intermediary tetapi dapat juga melakukan usaha bisnis yang tentunya berbasis syariah dan dapat juga sebagai pemegang saham pada suatu perusahaan dengan adanya membuka usaha investment banking.

Kata Kunci: Bank Syariah, optimalisasi, MEA

Abstract

The purpose of this study to give an idea of Islamic banking in order to optimize the face of the ASEAN Economic Community (AEC) by providing the solution of problems of Islamic banking in Indonesia to be able to face the ASEAN economic community. Based on the financial data shows the Islamic banking has the potential in Indonesia. Thus, the Islamic banking in Indonesia should be able to facilitate all banks in ASEAN can work together and unite in carrying out various development strategies. Therefore, the role of all parties in the development of Indonesian Islamic banking is expected to make Indonesia has good prospects, the more qualified and able to work with ASEAN countries in the face of a global market economy the ASEAN Economic Community (AEC). Islamic banking should be able to add a position not only as an intermediary institution but can also an engagement in business which must be based on islamic and it can be also a shareholder in a company to built of investment banking.

Keywords: Islamic Banks, optimization, MEA

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuka peluang bagi sejumlah sektor ekonomi di kawasan Asia Tenggara untuk mendapatkan *market size* yang lebih luas serta peluang investasi yang semakin besar. Implikasi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadikan perekonomian suatu negara sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekonomi global untuk bersiap menghadapi pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, investasi serta tenaga kerja. Hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan pasar denganskala global tentu akan berakibat munculnya persaingan antar negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN dituntut untuk saling bersaing dengan memanfaatkan peluang yang ada (Dhika, 2014).

Indonesia menduduki peringkat keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah negara Iran, Malaysia, dan Saudi Arabia. Indonesia yang mayoritas berpenduduk kaum muslim dengan jumlah terbesar di dunia akan menjadikan perbankan syariah Indonesia memiliki pangsa pasar yang luas. Hal ini tentu akan mendorong kemajuan perbankan syariah di Indonesia dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan negara-negara ASEAN yang lainnya terutama Malaysia (hamdi dan Armis,2015).

Sistem perkembangan perbankan syariah Indonesia yang lebih bertumpu pada sektor riil serta bersifat *market driven* dan dorongan *bottom up*, tanpa dikendalikan oleh pemerintah (Hayat, 2014). Hal tersebut menjadi keunggulan tersendiri dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk lebih mudah berkembang. Perbankan syariah Indonesia dapat mengembangkan kinerjanya sendiri tanpa menunggu pemerintah. Berbeda halnya dengan perkembangan perbankan syariah di negara Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, yang lebih bertumpu pada sektor

keuangan dengan dukungan dan campur tangan pemerintah yang sangat kuat, sehingga untuk dapat berkembang mereka harus menunggu peran pemerintah.

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat sejak adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Bahkan berdasarkan hasil survei dari Islamic Finance Country Index dari Global Islamic Finance Report, industri keuangan syariah di Indonesia telah menorehkan kinerja dengan menempati peringkat keempat industri keuangan syariah dunia yang dinilai dari ukuran-ukuran tertentu dan bobot yang bervariasi, seperti jumlah lembaga keuangan syariah, izin pengaturan syariah, besarnya volume industri, edukasi dan budaya, serta kelengkapan infrastruktur. Perkembangan jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Sementara itu, data yang diolah oleh Statistik Perbankan Syariah (2016), menjelaskan bahwa komposisi pembiayaan bank syariah terhadap akad muḍārahnya mengalami peningkatan signifikansi, tahun 2011 sebesar 10,226 triliyun menjadi 14,820 triliyun pada tahun 2015. Begitu juga pada akad Musyārahnya terus mengalami peningkatan, dari tahun 2011 sebesar 18,960 triliyun naik 60,713 triliyun pada tahun 2015. Sementara pada akad murabahanya tahun 2011 sebesar 56,367 triliyun menjadi 122,111 pada tahun 2015. Secara keseluruhan pembiayaan bank syariah mengalami peningkatan signifikan dimana pada tahun 2011 sebesar 102,655 triliyun menjadi 203,996 triliyun pada tahun 2015.

Data di atas menunjukkan bahwa peran perbankan syariah mempunyai andil dan peran penting dalam pengembangan ekonomi secara nasional. Peningkatan pembiayaan perbankan syariah melalui resapan bagi UKM dan Usaha besar terus berkembang. Begitu juga dengan aspek komposisi sistem dalam perbankan syariah mengalami rating yang sangat bagus dari tahun ke tahun. Data perkembangan bank

syariah terus mengalami perkembangan dari tahun ketahun yang ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Perbankan Bank syariah di Indonesia Periode 2011-2015

Tahun	Bank Umum Syariah		Unit Usaha Syariah	
	Jumlah Bank (unit)	Jumlah Kantor (unit)	Jumlah Bank (unit)	Jumlah Kantor (unit)
2011	11	1.401	24	226
2012	11	1.745	24	517
2013	11	1.998	23	590
2014	12	2.151	22	320
2015	12	2.121	22	327

Sumber : Otoritas Jasa Moneter, 2016

Dari data tabel 1 diatas menunjukkan jumlah bank syariah mengalami peningkatan baik pada jumlah banknya maupun jumlah kantornya.

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis secara deskriptif mengenai optimalisasi pada industri perbankan syariah dalam menghadapi MEA. Aspek yang dianalisis adalah bidang manajemen. Pembahasan tersebut dengan menganalisis dalam menentukan strategi untuk memberikan solusi dari permasalahan yang terdapat pada bank syariah di Indonesia.

c. Rumusan Masalah

Tantangan perbankan syariah dalam jangka pendek adalah sebagai berikut: (1) pemenuhan gap sumber daya insani; (2) inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan yang kompetitif serta berbasis atas kebutuhan masyarakat; dan (3) keberlangsungan sosialisasi dan edukasi. Sementara jangka panjangnya, antara lain: (1) dibutuhkannya kerangka hukum yang dapat dijadikan sandaran dalam

penyelesaian masalah keuangan syariah secara komprehensif; (2) adanya kodifikasi produk dan standar regulasi secara nasional dan global sebagai jembatan dalam perbedaan terhadap fiqh muāmmalah; dan (3) diperlukannya nilai imbal hasil (rate of return) bagi keuangan syariah (Alamsyah, 2012).

Permasalahan perbankan syariah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mendapat perhatian serius adalah upaya untuk memenuhi gap Sumber Daya Insani (SDI) dari tenaga kerja domestik agar tidak diisi oleh tenaga kerja asing. Salah satu kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yaitu *freedom of movement for skilled and talented labours* (Takidah, 2014). Keberadaan tenaga kerja adalah faktor penting dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terutama dalam perkembangan perbankan syariah Indonesia. Tenaga kerja merupakan pengendali barang, jasa, investasi maupun modal. Indonesia jika dilihat dari GDP yang dapat digunakan sebagai tolak ukur atas kuantitas tenaga kerja, tentu Indonesia masih kalah dengan negara Singapura, Malaysia dan Thailand.

Permasalahan selanjutnya yaitu Produk perbankan syariah Indonesia masih membutuhkan banyak inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan yang kompetitif yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

Permasalah lain yang menjadi tantangan dalam jangka panjang yaitu mengenai perlunya kerangka hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan keuangan syariah secara komprehensif. Diperlukan aturan hukum ekonomi/keuangan islam yang disepakati bersama untuk dijadikan rujukan dan disahkan oleh negara. Kerangka hukum tersebut perlu dilakukan penyempurnaan mencakup skala global untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi dalam transaksi keuangan syariah antar negara ASEAN yang juga termasuk perbankan syariah didalamnya. Penyempurnaan kerangka hukum diharapkan akan dapat memberikan suasana yang kondusif bagi pengembangan perbankan syariah Indonesia baik secara nasional maupun global terutama dalam menghadapi pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

d. Tujuan Penelitian

Dari fenomena perkembangan pembiayaan dan jumlah bank syariah di Indonesia serta terdapatnya masalah-masalah perbankan syariah masih perlu diambil langkah strategi yang tepat. Dengan demikian menimbulkan suatu penelitian dalam paper ini bagaimana optimalisasi bank syariah dengan memberikan solusi dari permasalahan perbankan syariah di Indonesia untuk dapat menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Penelitian ini berpedoman pada perkembangan literature penelitian bank syariah dengan membagi dimensi teori dan empiris. Selama ini penelitian bank syariah telah dimulai oleh peneliti seperti Mannan (1968), Ahmad (1987), Saeed (1996) and Iqbal and Mirakhor (1999). Mereka telah membahas secara lebih mendalam mengenai konsep dan prinsip-prinsip bank syariah (hamdi, 2016).

2. Tinjauan Pustaka

Dalam bidang penelitian ini, teori yang paling terkenal tentang hubungan kinerja bank adalah teori agensi. Karena dalam teori agensi menjelaskan hubungan antara pemilik dengan manajemen bank sehingga kinerja suatu bank sangat berhubungan dengan peranan dan fungsi manajemen dari bank tersebut. Dengan demikian daya saing sebuah bank sangat tergantung kepada kemampuan manajemen untuk mengelola bank masing-masing. Di samping besarnya peranan manajemen dalam mengelola bank agar dapat menghasilkan kinerja yang baik, peranan dari pemilik bank itu sendiri juga cukup besar untuk memberikan sumbangan dalam pemilihan manajemen yang baik. Oleh sebab itu, dalam hubungan antara pemilik bank dengan manajemen selalunya wujud kontrak kinerja (*performance contract*) di mana pemilik bank mensejajarkan kepentingan manajemen dengan kepentingan pemilik bank tersebut. Kontrak kinerja akan dibentuk agar gagasan yang diterima oleh manajemen berkait rapat dengan kinerja bank. Hubungan kontrak antara pemilik dan manajemen tersebut adalah bersesuaian dengan teori agensi (Jensen dan Meckling, 1976).

Konsep agensi seperti yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dapat dilihat pada hasil penelitian Berger dan Bonnaccorsi (2006), Basu *et al.* (2007) dan Sullivan dan Spong (2007) yang menunjukkan bahawa pemilik bank menyerahkan kepada manajemen sebagai agen untuk menjalankan bank tersebut. Hal ini disebabkan pemilik mengalami kesulitan untuk menjalankan bank secara langsung karena faktor-faktor berikut. Pertama, ukuran bank yang semakin besar akan menimbulkan kesulitan untuk menjalankannya. Kedua, memerlukan keahlian khusus untuk menjalankan bank yang besar dan umumnya pemilik tidak mempunyai keahlian tersebut. Ketiga, pemilikan bank ditentukan oleh jumlah pemegang saham. Seandainya jumlah pemegang saham terlalu banyak dan setiap orang memegang saham dalam jumlah yang kecil maka keadaan ini tidak memungkinkan semua pemilik menjalankan kegiatan bank secara efektif.

Berger dan Bonnaccorsi (2006) menyatakan manajemen bank mungkin akan mengabaikan kepentingan pemegang saham, sebaliknya memberi perhatian kepada kepentingan mereka dengan memberikan fasilitas seperti kelangsungan pekerjaan, gaya hidup yang mewah, keanggotaan profesional, kemudahan kenderaan pribadi, yang semuanya ditanggung oleh bank. Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan untuk mengatasi masalah agensi, pemegang saham mempunyai insentif untuk mengawasi pihak manajemen sehingga dapat mengurangi masalah prinsipal-agensi. Walau bagaimanapun, tingkat insentif tergantung kepada pegangan saham oleh pemilik. Seandainya pemilik memegang jumlah saham yang kecil, maka pemilik tidak akan mempunyai insentif untuk mengawasi perilaku manajemen. Ini disebabkan keuntungan yang diperoleh oleh pemilik adalah lebih kecil dari biaya pengawasan.

Walaupun teori agensi berfokus kepada memonitor peranan manajemen, tetapi teori stewardship mempunyai sudut pandang yang berbeda. Ia berpendapat bahwa agensi pada dasarnya dapat di percaya dan menjalankan pekerjaan dengan baik dari sumber yang di percayakan kepada mereka (Donaldson, 1990 dan Donaldson & Davis, 1994). Manajemen bekerja ke arah tujuan bersama dan karena itu menarik

untuk memperbaiki perusahaan melalui tujuannya (Donaldson & Davis,1991). Teori stewardship berpendapat bahwa manajemen sebagai pekerja bertanggungjawab mengurus operasional perusahaan untuk memperbaiki perusahaan (Donaldson & Davis,1991; Muth & Donaldson, 1998).

Teori stewardship mempunyai filosofis mengenai sifat manusia yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, mempunyai integritas, dan jujur terhadap orang lain. Inilah yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan demikian teori stewardship memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat pada umumnya maupun pemegang saham pada khususnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Pertumbuhan industri perbankan syariah Indonesia diperkirakan akan mencapai 20% pada tahun 2015, dan pada tahun tersebut Indonesia akan menghadapi persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 (Takidah, 2014). Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 akan berdampak terciptanya pasar bebas dibidang permodalan, barang dan jasa, investasi serta tenaga kerja. Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, yang pada nantinya diharapkan akan dapat mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi antar negara ASEAN (Puja, 2012).

Perbankan syariah Indonesia dapat dijadikan kekuatan negara Indonesia dalam menghadapi persaingan global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Perbankan syariah Indonesia yang terbukti mampu bertahan dari krisis ekonomi global tahun 2008 telah terbukti memiliki kinerja yang baik dari bank konvensional dan diharapkan mampu menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA). Faktor yang telah menyelamatkan perbankan syariah Indonesia menghadapi krisis ekonomi global dikarenakan pembiayaan perbankan syariah Indonesia yang masih lebih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestik, sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global serta belum memiliki tingkat transaksi yang tinggi. Banyak penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa bank syariah lebih baik dari bank konvensional. (Samad, 1999; Samad dan Hassan, 2000; Iqbal, 2001; Rosly dan Bakar, 2003; Samad, 2004; Kader *et al.*, 2007; Widagdo dan Ika; 2007; Beck *et al.*, 2010; Jaffar dan Manarvi, 2011; Ansari dan Rehman, 2011; Wahidudin *at al.*, 2012; Merchant, 2012; Zeitun, 2012; Babatunde dan Olaitan, 2013 dan hamdi, 2016).

Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) perbankan syariah Indonesia juga dihadapkan pada tantangan mengenai perlunya modifikasi produk dan standar regulasi yang bersifat nasional dan global. Hal tersebut sangat penting dikarenakan adanya perbedaan dalam pengembangan produk perbankan syariah di beberapa negara. Adanya perbedaan tersebut akan dapat memicu timbulnya resiko apabila terkait dengan transaksi keuangan. Untuk itu, diperlukan penyelarasan produk secara nasional terlebih secara global untuk menghadapi persaingan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang melibatkan negara-negara ASEAN. Penyelarasan tersebut diperlukan agar keuangan Islam yang salah satunya termasuk perbankan syariah dapat berkembang di berbagai negara dan tidak saling memproteksi karena perbedaan mazhab. Adanya lembaga internasional seperti, *International Financial Services Board (IFSB)* dan *International Islamic Financial Market (IIFM)* yang menghadirkan regulasi yang dapat dijadikan pedoman secara global sangat perlu dikembangkan untuk menciptakan peraturan secara internasional untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Berbagai tantangan diatas harus dapat diselesaikan untuk pengembangan perbankan syariah Indonesia terus dapat meningkatkan kualitas, terlebih dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dapat dijadikan untuk bekerjasama antar bank syariah di ASEAN sehingga MEA tidak sebagai persaingan

antara bank syariah di ASEAN namun dapat menjadikan persatuan yang akan menjadi bank yang besar di ASEAN walaupun memiliki perbankan syariah dengan karakteristik yang berbeda-beda.

Kebutuhan akan SDI (Sumber Daya Insani) dengan jumlah besar tidak diimbangi dengan tingginya jumlah tenaga kerja yang berbasis syariah. Penyediaan SDI yang kompeten dengan jumlah yang cukup menjadi tuntutan mutlak bagi bank syariah terutama dalam menghadapi MEA. Sumber Daya Insani (SDI) perbankan syariah Indonesia dituntut untuk memiliki penguasaan *operasional banking*, namun juga harus memperhatikan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) dari aspek syariah. Bank-bank syariah harus meningkatkan kompetensi SDMnya agar bisa mengatasi pembiayaan bermasalah dan mampu melakukan restrukturisasi pembiayaan secara syariah. Penelitian kompetensi telah banyak dilakukan oleh para peneliti seperti oleh McCredie dan Viv (2000), Robert *et al.* (2002); Dulewicz dan Higgs (2003); Malcom (2004); Ana Balen dan Juan (2005); Wheeler (2007);); Mark *et al.* (2007); Martin *et al.* (2007); Leonard (2008); Kunnanatt (2008); Rhee (2008); Mansor *et al.* (2010).

Bahkan SDM syariah seharusnya memiliki pengetahuan *early warning system* tentang pembiayaan syariah, sehingga pembiayaan bermasalah bisa diantisipasi dan diselamatkan dengan cepat. bank syariah juga perlu lebih meningkatkan kompetensi SDMnya dalam menganalisis aplikasi pembiayaan sebelum mendapat diapproval. Dalam proses ini bank syariah perlu melakukan *monitoring* sebelum dan sesudah pembiayaan diberikan. Dengan demikian perlu dikembangkan *training* dan *workshop* atau beasiswa kuliah pascasarjana. Tujuan dari pemberian beasiswa ini adalah agar calon pimpinan bank syariah dapat mengupgrade pengetahuan dan kemampuan *analyticalnya*. Program sertifikasi dalam bidang keuangan syariah ini perlu diperbanyak untuk menstandarisasi kemampuan dari staf perbankan syariah.

Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah Indonesia harus menciptakan produk dan layanan yang mengedepankan keunikan dari prinsip syariah dan kebutuhan dari masyarakat, terlebih dalam menghadapi persaingan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, diperlukan praktisi-praktisi perbankan syariah untuk menciptakan inovasi produk yang dapat menunjang pengembangan perbankan syariah Indonesia dalam menghadapi gencarnya arus perekonomian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada dasarnya, secara konseptual syariah, bank syariah di Indonesia mempunyai ruang yang luas untuk berinovasi dalam produk bisnisnya. Bahkan, inovasi bank syariah ini lebih luas dibanding bank konvensional. Bank konvensional produknya terbatas pada perannya sebagai lembaga intermediary. Sedangkan bank syariah, selain sebagai lembaga intermediary, juga dapat berperan sebagai pelaku usaha bisnis. Bank syariah dapat membuka usaha bisnis yang berbasis syariah seperti supermarket syariah, industri pakaian muslim, industri kebutuhan rumah tangga dan lain-lain dengan membuat anak perusahaan (Strategi Bisnis Unit) yang tidak terlepas dari berpegang pada syariah Islam. Selain itu, bank syariah dapat berperan layaknya pemegang saham, misalnya dalam produk pembiayaan mudharabah dan musyarokah. Bank syariah dapat berinvestasi yang berperan sebagai investment banking untuk menyalurkan dana dari investor ke usaha-usaha yang profit (Hamdi, 1999).

Tantangan yang juga memberikan pengaruh terhadap pengembangan perbankan syariah Indonesia adalah keinginan untuk menjalankan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas. Kegiatan sosialisasi dan edukasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan perbankan syariah Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan pusat biaya bagi perbankan syariah. Hayat (2014).

Selama ini kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah Indonesia dilakukan melalui program 'IB Campaign' baik melalui media masa, syariah expo, maupun penyelenggaraan seminar/workshop. Namun, Bank Indonesia akan

mengurangi peran tersebut seiring dengan pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan perbankan syariah termasuk didalamnya. Menyikapi hal tersebut, perbankan syariah Indonesia harus meningkatkan kemandirian dalam hal formulasi program dan pembiayaan sehingga program 'IB Campaign' dapat terus berlanjut.

Fatwa keuangan syariah di Indonesia bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen, sementara di negara lain fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat. Negara Malaysia memiliki struktur organisasi lembaga fatwa tidak berdiri sendiri secara independen namun berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM).

Peluang besar yang dapat menjadikan perbankan syariah Indonesia dapat berkembang di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi yang dapat memberikan ruang bagi perkembangan perbankan syariah Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, keadaan ekonomi Asia yang menunjukkan ketahanannya dengan tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang kuat, tingkat inflasi yang rendah, serta sistem keuangan yang sehat yang menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah Indonesia akan mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

5. Kesimpulan dan Saran

Berbagai permasalahan pada bank syariah di Indonesia menunjukkan perbankan syariah mesti bekerjasama dan bersatu bukan menjadi pesaing antar bank syariah dengan upaya keras dari perbankan syariah Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). maka perbankan syariah Indonesia harus mampu menjembati semua perbankan di ASEAN untuk dapat bekerjasama dan bersatu dalam menjalankan berbagai strategi pengembangan. Untuk itu, peran semua pihak dalam

pengembangan perbankan syariah Indonesia diharapkan mampu menjadikan perbankan syariah Indonesia memiliki prospek yang baik, semakin berkualitas dan mampu bekerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam menghadapi ekonomi pasar global. Perbankan syariah semestinya dapat menambah posisi tidak hanya sebagai lembaga intermediasi tetapi dapat juga melakukan usaha bisnis yang tentunya berbasis syariah dan dapat juga sebagai pemegang saham pada suatu perusahaan dan dapat mengembangkan usaha dengan membuka usaha investment banking.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (1987). Development and Problems of Islamic Banks, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah
- Alam, Syamsul.(2015). Penulisan Artikel Ilmiah untuk Publikasi Ilmiah Melalui Jurnal. *Artikel E-Buletin*. ISSN April, hal.355-389.
- Alamsyah, Halim. (2012). Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015. Makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-18 IAEI, (13 April 2012).
- Ana, B., & Juan. (2005). A model for evaluating organizational competencies : An application in the context of quality management initiative. *Decision Sciences*, 36(2), 221-257.
- Ansari, A. and Rehman, A. (2011), Financial performance of Islamic and conventional banks in Pakistan: A comparative study, 8th International Conference on Islamic Economics and Finance - Doha. 1 (1), 1-19.
- Babatunde, O.A. and Olaitan, O. A. (2013), The performance of conventional and Islamic banks in the United Kingdom: A comparative analysis. *Journal of Research in Economics and International Finance*, 2(2), 29-38.
- Basu, S., Hwang, L. S., Mitsudome, T., & Weintrop, J. (2007). Corporate governance, top executive compensation and firm performance in Japan. *Pacific-Basin Finance Journal*, 15, 56-79.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. and Merrouche, O. (2010), Islamic vs. Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability. Working Paper 5446 (WPS5446). The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Development Team.
- Berger, A N., & Bonaccorsi. E. P. (2006). Capital structure and firm performace: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry. *Journal of Banking and Finance*, 29, 1065-1102.

- Dhika Putri Awwallin. (2014). Peluang, tantangan dan prospek perbankan syariah Indonesia dalam menghadapi persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Universitas Negeri Surabaya. www.google.com
- Donaldson, L. (1990). The ethereal hand: organizational economics and management theory. *Academy of Management Review*, 15, 369-381.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1994). Boards and company performance: Research challenges the conventional wisdom. *An International Review*, 2(3), 151-160.
- Duluwicz, S. V., & Higgs, M. J. (2003). Emotional intelligence: a Review and evaluation studi. *Journal of Managerial Psychology*, 15, 341-68.
- Hamdi, Agustin (1999). Analisis kelayakan usaha investemen banking pada bank Muamalat Indonesia. Tesis Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Hamdi, Agustin dan Armis (2015). Tantangan dan peluang perbankan syariah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. *Jurnal KIAT*, 15(2), 23-36
- Hamdi, Agustin (2016), Financial performance Islamic banking unit in Indonesia: A comparative study private banks and regional development banks. *International Journal Economic and Research*. 13(4), 795-8057
- Hayat. (2014). Globalisasi Perbankan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Praktis dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Hunafa: *Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No. 2, Desember 2014: 293-314
- Iqbal, M. (2001), Islamic and conventional banking in the nineties: A comparative stud. *Islamic Economic Studies*, 8(2): 1-28.
- Iqbal, Z. dan Mirakhor, A. (1999). Progress and Challenges of Islamic Banking. *Thunderbird International Business Review*. 41 (4-5): 56-68.
- Jaffar, M. and Manarvi, I. (2011), Performance comparison of Islamic and conventional Banks in Pakistan. *Global Journal of Management and Business Research*, 11(1), 59-66.

- Jensen, M., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Kader, J.M., Asarpota, A.J. and Al-Maghaireh, A. (2007), Comparative Financial Performance of Islamic Banks vis-à-vis Conventional Banks in the UAE. Proceeding on Annual Student Research Symposium and the Chancellor's Undergraduate Research Award. Retrieved <http://sra.uaeu.ac.ae/CURA/Proceedings> (May 31, 2007).
- Kunnanatt, J. T. (2008). Emotional intelligence: Theory and description.
- Leonard, D. C. (2008). The impact of learning goals on emotional, social, and cognitive intelligence competency development. *Journal of management development*, 27(1), 109-128.
- Malcom, H. (2004). A study of the relationship between emotional intelligence and performance in UK call centres. *Journal of managerial psychology*, 19(4), 442-454.
- Mannan, M. A. (1968). Islam and Trend in Modern Banking: Theory and Practice of Interest Free Banking. *Islamic Review and Arab Affairs*, 73-95.
- Mansor, N., Malik, N. H., & Mat, A. C. (2010). Enculturation of Organization Learning For Developing Competency: a Case of Malaysian Islamic Banking Institution.
- Maris Strategies & the Banker (2010), Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries, ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION SESRIC.
- Mark. (2007). Forecasting future competency : a three-phase methodology. countries using panel data analysis. *Global Economy and Finance Journal*, 5 (1), 53-72.
- Martin, M., Lans, T., Vestagen, J., Biemans, H., & Meijer. (2007). Competence development of entrepreneurs in innovative horticulture. *Journal of Workplace Learning*, 19, 32-44.
- McCredie, H., & Shackleton, V. (2000). Research note the unit general manager : a competency profile. *Personal review*, 29(1), 114.

- Merchant, I. P. (2012), Empirical study of Islamic Banks Versus Conventional Banks of GCC, *Global Journal of Management and Business Research*, 12(20), 33-41.
- Muth, M., & Donaldson, L. (1998). Stewardship theory and board structure: A contingency approach. *Journal Corporate Governance an International Review*, 6 (1), 5- 28.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah.
- Puja, I Gusti Agung Wesaka . (2012). *ASEAN Selayang Pandang Edisi Ke-20*. Jakarta
- Rhee, K. S. (2008). The beat and rhythm of competency development over two years. *Journal of management development*, 27(1), 146-160.
- Robert, E., Spear, S., & Kamauff, J. (2002). Suplay chain competency: Leaning as a key component. *Suplly chain management: An international*, 7(1), 41-55.
- Rosly, S. A. and Bakar, M.A.A. (2003), Performance of Islamic and Mainstream Banks in Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 30 (12), 1249-1265.
- Saeed, M. (1996). *Islamic Banking and Interest*, E.J. Brill, The Netherlands.
- Samad, A. (1999), Comparative Efficiency of the Islamic Bank Malaysia vis-à-vis Conventional Banks. *IIUM Journal of Economics and Management*, 7 (1), 1-25.
- Samad, A. (2004), Performance of Interest Free Islamic Banks vis-à-vis Interest-Based Conventional Banks of Bahrain. *IIUM Journal of Economics and Management*, 12 (2), 1-25.
- Samad, A. and Hassan, M. K. (2000), The performance of Malaysian Islamic Bank during 1984-1997: An explanatory study. *Thoughts on Economics*, 10 (1&2), 7-26.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. *Journal of Finance*, 52, 737-783.
- Sullivan, R. J., & Spong, K. R. (2007). Manager wealth concentration, ownership structure and risk in commercial banks. *Journal of Financial Intermediation*, 16, 229-248.

- Takidah, Erika. (2014). Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. *Seminar dan Konferensi Nasional FE UNJ*, 22-23 April.
- Takidah, Erika. 2014. Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. *Seminar dan Konferensi Nasional FE UNJ*, 22-23 April.
- Tedjasuksmana, Budiarto. (2014). Potret UMKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. *Jurnal UKWMS*. ISSN No: 1978-6522.
- Wahidudin, A.Z., Subramanian, U. and Kamaluddin, P. (2012), Determinants of profitability- A comparative analysis of Islamic banks and conventional banks in ASEAN countries. 2nd International Conference on Accounting, Business and Economic, MS Garden Hotel, Kuantan Pahang; Malaysia.
- Wheeler, J. V. (2007). The impact of social environments on emotional, social, and cognitive competency development. *Journal Management Development*, 27(1), 129-145.
- Widagdo, A. and Ika, S.R. (2007), The Interest prohibition and financial performance of Islamic Banks: Indonesia Evidence. Paper presented in 19th Asian-pacific Conference on International Accounting Issues. Malaysia, Kuala Lumpur.
- Zeitun, R. (2012), Determinants of Islamic and Conventional banks performance in GCC